

UJIAN TENGAH SEMESTER

(UTS)

TEMA PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA:

ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN



NAMA : AGUS EFFENDI

NPM : 2526061014

PRODI MEGISTER ILMU ADMINISTRASI

KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK

MATA KULIAH

KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA:.....	1
ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN.....	1
I. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.1. Fenomena Sampah di Indonesia.....	1
1.2. Dampak Lingkungan dan Sosial	2
II. AGENDA SETTING.....	3
2.1. Proses Penentuan Isu.....	3
2.2. Aktor dan Proses Politik.....	5
III. FORMULASI KEBIJAKAN	6
3.1. Penyusunan Kebijakan	6
3.2. Implementasi dan Evaluasi.....	8
PENUTUP	10
REFERENSI.....	12

PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA: ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

1.1. Fenomena Sampah di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, namun hanya sebagian kecil yang dikelola dengan benar. Sebagian besar sampah dibakar, dibuang ke sungai, atau dibiarkan menumpuk di lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Azzahra & Frinaldi, 2023).

Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu, sampah yang menumpuk juga menjadi sarang penyakit dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan (Lingga et al., 2024).

Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “Fenomena Sampah di Indonesia” dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia :

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu (termasuk perilaku membuang atau memilah sampah) dipengaruhi oleh: sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). Cocok untuk memahami mengapa banyak warga di Indonesia belum melakukan pengelolaan sampah yang baik (Sia Niha et al., 2022).

2. Circular Economy Theory

Teori ini memandang sampah bukan hanya sebagai masalah akhir (“end of pipe”) tetapi sebagai bagian dari siklus ekonomi yang harus di-reduce, reuse, recycle, recover. Dalam konteks Indonesia, teori ini cocok untuk menjelaskan munculnya paradigma “ekonomi sirkular” dalam pengelolaan sampah (Hisyam et al., 2025).

3. Social Capital Theory

Teori ini menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, norma bersama dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Relevan untuk fenomena sampah di Indonesia karena keberhasilan pengelolaan sampah masyarakat seringkali bergantung pada solidaritas, gotong-royong, dan dukungan komunitas (Salsabila et al., 2024).

4. Urban Ecology Theory

Teori yang melihat kota sebagai sistem ekologi kompleks—urbanisasi, perubahan fungsi lahan, konsumsi, dan produksi limbah menjadi bagian dari dinamika ekologi

kota. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan kota, konsumsi meningkat, dan timbunan sampah naik, sehingga teori ini membantu menjelaskan “fenomena sampah kota” (Wikurendra et al., 2024).

5. Environmental Justice Theory

Teori yang menyoroti distribusi dampak lingkungan secara tidak merata serta akses ke pengelolaan dan keadilan proses kebijakan. Relevan untuk fenomena sampah di Indonesia karena sering terjadi bahwa kawasan miskin atau pinggiran kota menanggung beban terbesar dari masalah sampah (Febrian, 2025).

1.2. Dampak Lingkungan dan Sosial

Fenomena sampah di Indonesia menimbulkan dampak lingkungan yang kompleks akibat meningkatnya populasi, urbanisasi, dan pola konsumsi yang tidak seimbang dengan kapasitas pengelolaan. Menurut Teori Ekonomi Lingkungan, sampah yang tidak terkelola menciptakan eksternalitas negatif berupa pencemaran tanah, air, dan udara yang menurunkan kualitas ekosistem serta menimbulkan biaya ekonomi dan risiko kesehatan masyarakat. Dalam perspektif Teori Resiliensi Sosial-Ekologi, krisis sampah melemahkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan perkotaan padat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem sosial dan ekologis secara menyeluruh.

Dari sisi sosial, pengelolaan sampah mencerminkan ketimpangan keadilan lingkungan. Teori Keadilan Lingkungan menjelaskan bahwa dampak negatif sampah lebih banyak ditanggung kelompok miskin di sekitar TPA atau daerah tercemar, sedangkan Teori Modal Sosial menyoroti peran solidaritas dan kepercayaan masyarakat dalam membangun solusi seperti bank sampah dan daur ulang komunitas. Selain itu, Teori Perilaku Lingkungan menegaskan pentingnya perubahan perilaku individu dalam memilah dan membuang sampah secara benar sebagai faktor kunci pengurangan beban sosial-ekologis. Dengan demikian, pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia memerlukan kombinasi pendekatan struktural dan partisipatif, yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan perubahan paradigma menuju sistem sosial-ekologis yang adil dan tangguh.

Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “Dampak Lingkungan dan Sosial” dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia :

1. Teori Keadilan Lingkungan (Environmental Justice Theory)

Teori ini menekankan bahwa dampak lingkungan (termasuk pengelolaan sampah) tidak hanya soal kerusakan ekologi, tapi juga tentang distribusi dampak yang tidak merata antar kelompok masyarakat—misalnya warga pinggiran yang tinggal dekat TPA menanggung beban lebih besar. Dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia, teori ini sangat relevan untuk menyoroti aspek sosial-keadilan: siapa yang terdampak, siapa yang memiliki akses ke pengelolaan, dan bagaimana kebijakan memperhitungkan keadilan distribusi dan proses (Febrian, 2025).

2. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory)

Didalam teori ini dijelaskan bahwa modal social jaringan, kepercayaan, norma bersama berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial termasuk dalam

pengelolaan sampah. Dampak sosial seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, dan kesehatan lingkungan dapat dihubungkan dengan modal sosial. Dalam konteks sampah, komunitas yang memiliki modal sosial tinggi lebih mampu mengelola sampah secara kolektif, menghasilkan daya sosial positif (Burhanuddin, 2024).

3. Teori Resiliensi Sosial – Ekologi Sosial (Social-Ecological Resilience Theory)

Dalam teori ini menjelaskan bahwa memandang sistem sosial-ekologi (masyarakat + lingkungan) sebagai satu kesatuan yang harus memiliki kemampuan beradaptasi dan pulih dari tekanan (seperti timbulan sampah, pencemaran). Dampak lingkungan dan sosial pengelolaan sampah bisa dilihat dari kemampuan masyarakat menghadapi beban sampah, perubahan kondisi, dan pemulihan lingkungan (Artiningsih et al., 2016).

4. Teori Ekonomi Lingkungan (Environmental Economics Theory)

Teori ini melihat dampak lingkungan dan sosial dalam kerangka biaya-manfaat, valuasi kerusakan lingkungan, dan bagaimana sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan biaya tersembunyi (kesehatan, pencemaran, sosial) serta kehilangan peluang ekonomi. Di Indonesia, relevan untuk menilai dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat, kualitas hidup, biaya pengelolaan, dan ketidak setaraan sosial (Maskun et al., 2024).

5. Teori Perilaku Lingkungan / Perilaku Konsumen (Environmental Behavior Theory)

Teori ini fokus pada bagaimana perilaku individu/masyarakat mempengaruhi dampak lingkungan dan sosial – termasuk dalam pengelolaan sampah. Misalnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, atau kurang partisipasi dalam program 3R berkontribusi pada beban sosial dan lingkungan. Menjelaskan bagaimana perubahan perilaku menjadi bagian penting dari solusi (Sia Niha et al., 2022).

II. AGENDA SETTING

2.1. Proses Penentuan Isu

Agenda setting dalam kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia berperan penting dalam menentukan bagaimana isu sampah menjadi perhatian publik dan prioritas pemerintah. Berdasarkan Teori Multiple Streams Framework (Kingdon, 1995), isu ini naik ke agenda kebijakan ketika aliran masalah, kebijakan, dan politik bertemu pada satu momentum. Peningkatan timbulan sampah, bencana TPA, dan tekanan publik menjadi arus masalah; program 3R dan ekonomi sirkular membentuk arus kebijakan; sementara komitmen terhadap SDGs memperkuat arus politik. Pertemuan ketiganya melahirkan kebijakan seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017.

Selain itu, menurut Teori Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1972), media massa berperan besar membentuk persepsi publik melalui pemberitaan isu krisis sampah dan pencemaran plastik. Dukungan teori seperti *Framing Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Institutional Theory* menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan hasil interaksi antara tekanan publik,

media, dan aktor kebijakan, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “Proses Penentuan Isu” (Agenda Setting)” dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia:

1. Agenda-Setting Theory

Teori ini menjelaskan bahwa media massa dan aktor kebijakan memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang isu apa yang dianggap penting. Dalam konteks sampah, liputan media mengenai krisis sampah di berbagai kota membuat isu ini naik menjadi perhatian nasional dan masuk ke agenda kebijakan publik, (Yuliatiningtyas, 2023).

2. Multiple Streams Framework

Teori ini menjelaskan bahwa agar suatu isu masuk ke dalam agenda kebijakan, tiga arus—*problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*—harus bertemu dalam *policy window*. Dalam isu sampah, peningkatan volume sampah (problem), munculnya kebijakan 3R (policy), dan tekanan publik (politics) bersatu sehingga isu pengelolaan sampah menjadi prioritas nasional (Widyatama, 2018).

3. Framing Theory

Teori ini memusatkan perhatian pada bagaimana isu dikonstruksi atau dibingkai (framed) oleh media, pemerintah, atau aktor lain sehingga mempengaruhi persepsi publik. Dalam pengelolaan sampah, isu sering dibingkai sebagai “masalah kebersihan” bukan “peluang ekonomi hijau,” yang akhirnya menentukan fokus kebijakan public (Putri, 2022).

4. Stakeholder Theory

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu tertentu. Dalam pengelolaan sampah, aktor seperti masyarakat, LSM, sektor swasta, dan media berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan. Interaksi antaraktor ini membentuk cara isu sampah dibingkai dan direspons oleh pemerintah. Penelitian dalam Jurnal Online Pemerintahan dan Politik (JOPPAR) Universitas Negeri Yogyakarta menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci efektivitas kebijakan publik, sejalan dengan prinsip utama teori stakeholder. (Artamevia, V.D. & Yuanjaya, 2024).

5. Institutional Theory

Teori ini menekankan bahwa struktur birokrasi, norma formal, dan regulasi berperan penting dalam membentuk perilaku aktor serta arah kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah. Penelitian Fernandes et al. (2022) menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan yang kuat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. (Fernandes et al., 2022).

2.2. Aktor dan Proses Politik

Dalam proses agenda setting kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, berbagai aktor memiliki peran penting dalam menentukan arah dan prioritas isu. Berdasarkan Stakeholder Theory (Freeman, 1984), kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan komunitas lokal. Sementara Institutional Theory (Scott, 2001) menekankan peran lembaga dan regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 dalam memberi legitimasi dan arah kebijakan.

Selain itu, Advocacy Coalition Framework (Sabatier, 1988) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan sering didorong oleh kerja sama antaraktor dengan tujuan yang sama, seperti pemerintah dan organisasi lingkungan. Punctuated Equilibrium Theory (Baumgartner & Jones, 1993) menunjukkan bahwa krisis seperti tragedi TPA Leuwigajah 2005 dapat menjadi pemicu perubahan kebijakan besar. Sementara Public Choice Theory menyoroti pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam prioritas kebijakan. Dengan demikian, agenda kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan hasil interaksi antara aktor, lembaga, dan dinamika politik yang saling memengaruhi. Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “*Aktor dan Proses Politik dalam Agenda Setting Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia*” beserta penjelasan dan sumber rujukan:

1. Stakeholder Theory (Freeman, 1984)

Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) pemerintah, masyarakat, industri, LSM, media dan bahwa keterlibatan aktif para pihak ini memengaruhi proses penentuan isu serta arah kebijakan. Salah satu jurnal yang relevan adalah “Peranan Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Padat” jurnal ini menguraikan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berperan, menunjukkan relevansi teoritis stakeholder theory dalam konteks kebijakan sampah di Indonesia (Larasati & Santoso, 2023).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia : Diterapkan dalam kolaborasi multi pihak seperti *bank sampah*, kemitraan 3R, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

2. Institutional Theory (Scott, 2001)

Teori kelembagaan menyoroti bahwa struktur kelembagaan, norma formal, dan regulasi pemerintah berperan penting dalam menentukan isu mana yang akan diprioritaskan dan bagaimana kebijakan dijalankan. Sebagai referensi, terdapat jurnal “Pengelolaan Sampah dalam Ranah Kebijakan Publik” jurnal tersebut membahas bagaimana regulasi nasional maupun daerah pengelolaan sampah di Indonesia memengaruhi pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan kerangka institutional theory (Artamevia, V.D. & Yuanjaya, 2024).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia :Regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 memperlihatkan pengaruh institusi terhadap sistem pengelolaan sampah nasional.

3. Advocacy Coalition Framework (Sabatier, 1988)

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan publik sering terjadi melalui kerja sama atau koalisi antara aktor-kebijakan yang memiliki keyakinan atau nilai yang sama; koalisi tersebut kemudian memengaruhi agenda, alternatif kebijakan, dan implementasi kebijakan (Taufik, 2023).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia :Terlihat pada kolaborasi WALHI, GIDKP, dan akademisi dalam mendorong kebijakan pengurangan plastik sekali pakai.

4. Punctuated Equilibrium Theory (Baumgartner & Jones, 1993)

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan publik tidak selalu berkembang secara linier dan bertahap, melainkan bisa mengalami perubahan drastis setelah periode stabil misalnya ketika muncul krisis atau tekanan besar yang membuka “jendela kebijakan” (Wijaya, 2023) .

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia :Tragedi TPA Leuwigajah (2005) menjadi momentum lahirnya kebijakan nasional baru tentang persampahan .

5. Public Choice Theory (Buchanan & Tullock, 1962)

Teori ini melihat kebijakan publik sebagai hasil interaksi rasional aktor-politik atau birokrat yang mengejar kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, bukan semata kesejahteraan kolektif; relevan untuk melihat bagaimana kepentingan tertutup atau “rent-seeking” memengaruhi agenda kebijakan (Nurkhamid, 2023).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia :Kepentingan elektoral dan ekonomi sering menentukan prioritas anggaran dan proyek pengelolaan sampah daerah

III. FORMULASI KEBIJAKAN

3.1. Penyusunan Kebijakan

Dalam praktik penyusunan kebijakan, model rasional komprehensif sering dijadikan standar normatif: pembuat kebijakan idealnya mengumpulkan data lengkap, merumuskan alternatif, serta memilih solusi optimal. Namun tulisan-tulisan akademik Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan data dan kapasitas birokrasi kerap menghambat penerapan model ini secara penuh (Budiyati, 2021). Oleh sebab itu, bounded rationality menjadi kerangka yang lebih realistis untuk memahami perilaku perumus kebijakan di lapangan: pembuat kebijakan cenderung memilih solusi *satisficing* berdasarkan informasi yang tersedia (Retorika, 2024).

Sejalan dengan itu, banyak praktik kebijakan di Indonesia menggambarkan inkrementalism perubahan kebijakan dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian kecil dan akumulasi pengalaman kebijakan (lihat kajian Kemendagri, 2023). Untuk meningkatkan legitimasi dan keberterimaan kebijakan, pendekatan deliberatif dan partisipatif kian mendapat tempat: demokrasi deliberatif menuntut ruang dialog publik yang rasional, sedangkan teori partisipasi (Arnstein) memberi ukuran tentang seberapa jauh warga dilibatkan (Mariana, 2015; Haliim, 2016). Kombinasi pemahaman ini membantu menjelaskan bagaimana penyusunan kebijakan (termasuk pengelolaan sampah) di Indonesia sebaiknya dirancang yaitu: berbasis analisis

namun realistis terhadap keterbatasan, bertahap namun terukur, dan melibatkan publik secara bermakna.

Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “*Penyusunan kebijakan*” beserta penjelasan dan sumber rujukan:

1. Rational Comprehensive Theory

Model **Rasional Komprehensif** menekankan bahwa pembuat kebijakan seharusnya mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan data lengkap, mengevaluasi semua alternatif, dan memilih opsi yang paling optimal. Namun, menurut Isma dalam penelitiannya penerapan model ini di negara berkembang seperti Indonesia sering terbatas oleh kurangnya data, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya, sehingga aspek rasionalitas hanya dapat diterapkan secara parsial dalam praktik kebijakan. (Ismah, 2021)

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia : Proses penyusunan kebijakan sampah nasional seperti *Perpres No. 97 Tahun 2017* menggunakan data dan analisis berbasis penelitian untuk menghasilkan kebijakan komprehensif.

2. Bounded Rationality Theory

Menegaskan bahwa pengambil keputusan menghadapi keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif sehingga tidak selalu dapat memilih alternatif optimal; yang terjadi adalah *satisficing* (memilih solusi yang “cukup baik”). Teori ini menjelaskan praktik pengambilan keputusan yang realistis dalam penyusunan kebijakan.

Relevansinya dengan jurnal ini membahas konsep rasionalitas terbatas dan aplikasinya pada pengambilan keputusan publik, sehingga mendukung penggunaan bounded rationality sebagai kerangka untuk menjelaskan mengapa pembuat kebijakan sering menggunakan heuristik, data parsial, dan pendekatan pragmatis saat menyusun kebijakan (Raihana Zahra Aurellia, 2023).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia : Dalam kebijakan pengelolaan sampah, keputusan sering diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas daerah dan faktor politik.

3. Incrementalism Theory

Menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian dan keterbatasan, kebijakan cenderung dikembangkan secara bertahap (perubahan kecil-tahap demi tahap) daripada lewat perubahan radikal. Cocok untuk menjelaskan proses formulasi kebijakan yang berproses longgar dan berkelanjutan.

Artikel ini menelaah penerapan model inkremental dalam kebijakan publik Indonesia dan menyimpulkan bahwa banyak kebijakan di Indonesia memang berjalan secara bertahap (inkremental). Oleh karena itu, inkrementalism relevan untuk menjelaskan strategi formulasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkembang melalui penyesuaian bertahap dan pembelajaran kebijakan (Hulu, 2023)

4. Deliberative Policy Theory

Menekankan pentingnya dialog publik, deliberasi rasional antaraktor, dan legitimasi melalui proses partisipasi dalam perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yang deliberatif melibatkan konsultasi, forum publik, dan ruang dialog untuk mencapai legitimasi.

Dokumen ini menjelaskan konsep demokrasi deliberatif dalam konteks Indonesia dan menekankan perlunya ruang deliberasi dalam proses kebijakan. Hubungannya: jurnal ini menyediakan landasan teoritis bagaimana proses perumusan kebijakan (termasuk pengelolaan sampah) dapat dibentuk melalui dialog publik yang legitim—mendukung argumen bahwa formulasi kebijakan lebih efektif bila bersifat deliberatif (Wimmy, 2016).

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia : Konsultasi publik dan kolaborasi antaraktor dalam penyusunan kebijakan nasional dan daerah tentang sampah mencerminkan pendekatan deliberatif.

5. Participatory Theory

Menekankan tingkatan-tingkatan partisipasi warga (dari tokenism hingga citizen control). Dalam formulasi kebijakan, tingkat partisipasi memengaruhi legitimasi, efektivitas, dan keberterimaan kebijakan.

Artikel ini mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi publik dalam proses kebijakan di Indonesia, menegaskan pentingnya partisipasi bermakna. Hubungannya: jurnal ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumen bahwa penyusunan kebijakan pengelolaan sampah akan lebih efektif bila melibatkan warga secara lebih dari sekadar konsultasi simbolis (Mariana, 2017)

Aplikasi dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Indonesia : Penerapan *bank sampah*, forum warga, dan kemitraan publik-swasta menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan sampah.

3.2. Implementasi dan Evaluasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menguji sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Berdasarkan Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan implementasi bergantung pada kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan komitmen pelaksana. Kebijakan seperti Perpres No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas) diterapkan melalui Jakstrada di daerah untuk mencapai target pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% pada 2025. Namun, pelaksanaannya masih terkendala kapasitas daerah yang tidak merata, koordinasi lemah, dan keterbatasan anggaran. Karena itu, sinergi lintas sektor dan penguatan kelembagaan menjadi kunci efektivitas implementasi.

Sementara itu, menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Hasilnya menunjukkan keberhasilan bervariasi—kota seperti Surabaya dan Malang berhasil menerapkan sistem 3R dan *waste to energy*, sedangkan daerah lain masih bergantung pada TPA konvensional. Evaluasi berbasis data dan partisipasi masyarakat penting untuk memastikan kebijakan lebih adaptif dan berkelanjutan. Berikut 5 (lima) teori yang dipilih dan relevan dengan pembahasan “Implementasi dan Evaluasi” beserta penjelasan dan sumber rujukan:

1. **Teori Implementasi** Teori ini menjelaskan: **keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada: (a) kejelasan tujuan kebijakan; (b) konsistensi dengan sumber daya dan kemampuan organisasi pelaksana; (c) dukungan politik; dan (d) mekanisme pengawasan/evaluasi yang memadai.**

Hubungan teori-jurnal dalam pembahasan ini adalah menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada tingkat daerah (mis. ketersediaan anggaran, kapasitas teknis Dinas LH, sosialisasi). Temuan-temuan ini sesuai dengan kriteria keberhasilan Mazmanian & Sabatier: ketika tujuan tidak jelas, sumber daya kurang, atau komitmen pelaksana rendah, implementasi cenderung terhambat. Oleh karena itu jurnal ini dapat dipakai untuk menjelaskan variasi capaian implementasi kebijakan persampahan antar daerah di Indonesia (Sari & Afrinaldi, 2025)

2. **Teori Bottom-Up / Street-Level Bureaucracy (Lipsky, 1980) & pendekatan Top-Down vs Bottom-Up**

Didalam teori ini dijelaskan bahwa: efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh pelaksana garis depan (*street-level bureaucrats*) mereka yang menerjemahkan kebijakan menjadi praktik di lapangan serta oleh keseimbangan antara arahan pusat (top-down) dan inisiatif lokal (bottom-up).

Hubungan teori-jurnal dalam pembahasan ini adalah menguraikan peran aktor-aktor lapangan (petugas DLH, pengurus bank sampah, kader lingkungan) dan menyoroti kebutuhan sinergi antara instruksi kebijakan pusat dan penyesuaian implementasi di daerah. Ini mencerminkan perspektif Lipsky bahwa keputusan operasional dan interpretasi di tingkat lapangan sangat menentukan hasil akhir kebijakan. Jurnal ini mendukung argumen bahwa tanpa dukungan dan kapasitas *street-level bureaucrats*, kebijakan persampahan yang baik di tingkat pusat tidak otomatis berhasil di lapangan (Artha Heru; Candradewini, 2023)

3. **Teori Policy Learning**

Teori ini menjelaskan: pembuat kebijakan dan koalisi aktor belajar dari pengalaman implementasi, evaluasi, dan bukti empiris; pembelajaran ini memicu revisi kebijakan dan perbaikan desain kebijakan.

Hubungan teori-jurnal dalam pembahasan ini adalah evaluasi berbagai inisiatif persampahan dan rekomendasi kebijakan nasional yang muncul dari pengalaman implementasi. Materi tersebut cocok digunakan untuk menjustifikasi konsep *policy learning* yakni bagaimana pembuat kebijakan menyesuaikan strategi (mis. Jakstranas) berdasarkan pelajaran lapangan, evaluasi program, dan rekomendasi para pemangku kepentingan. Dokumen ini menyediakan bukti empiris mengenai proses pembelajaran kebijakan di Indonesia (Qodriyatun et al., 2023)

4. **Teori Governance**

Penjelasan teori ini adalah bahwa: tata kelola berbasis jaringan (*network/governance*) menekankan kolaborasi antar-aktor (pemerintah, swasta, LSM, akademisi, komunitas) dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik; keberhasilan bergantung pada mekanisme koordinasi, kepercayaan, dan partisipasi.

Hubungan teori-jurnal dalam pembahasan ini adalah membahas pengalaman membangun tata kelola kolaboratif di kawasan Bandung Raya, menyoroti peran kemitraan antar-pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta untuk merespons kondisi darurat sampah. Isi artikel ini secara langsung mendukung kerangka *collaborative governance* menunjukkan bahwa koordinasi lintas-aktor dan mekanisme kolaborasi konkret (forum, MoU, program bersama) adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah (Bonti et al., 2024)

5. Teori Evaluasi Kebijakan

Teori ini membahas tentang bagaimana melakukan evaluasi kebijakan mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak; model seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) membantu menilai semua tahap program dari desain hingga hasil.

Hubungan teori-jurnal dalam pembahasan ini adalah: studi evaluatif tersebut memaparkan metode dan indikator yang digunakan untuk menilai performa pengelolaan TPA (mis. pencapaian 3R, pengurangan timbulan, efisiensi operasional). Temuan-temuan ini relevan untuk menerapkan prinsip evaluasi kebijakan (Rossi et al., Stufflebeam), yakni menggunakan output dan outcome yang terukur untuk menilai keberhasilan dan merekomendasikan perbaikan kebijakan. Artikel ini menyediakan contoh praktis bagaimana evaluasi dijalankan di lapangan dan hasil apa yang perlu diukur (Rama Nanda et al., 2024)

PENUTUP

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu multidimensi yang menyangkut aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola kebijakan publik. Bab I menegaskan bahwa peningkatan timbulan sampah seiring urbanisasi dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Konsep-konsep seperti *ekonomi lingkungan*, *keadilan lingkungan*, dan *modal sosial* digunakan untuk menjelaskan dampak ekologis dan sosial dari ketimpangan akses serta kesadaran publik terhadap pengelolaan sampah. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Bab II membahas proses *agenda setting* kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Proses ini menunjukkan bagaimana isu sampah naik menjadi prioritas kebijakan nasional melalui kombinasi tekanan publik, dukungan politik, dan momentum kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh *Multiple Streams Framework*. Peran aktor dan media dalam membentuk persepsi publik, seperti dijelaskan oleh *Agenda Setting Theory* dan *Framing Theory*, menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan. Selain itu, *Stakeholder Theory* dan *Institutional Theory* memperkuat pemahaman bahwa kebijakan pengelolaan sampah merupakan hasil interaksi dinamis antara berbagai aktor dan struktur kelembagaan yang mempengaruhi prioritas isu.

Bab III menjelaskan tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Pada tahap formulasi, teori-teori seperti *Rational Comprehensive* dan *Participatory Theory* menekankan pentingnya analisis rasional dan partisipasi publik dalam merancang kebijakan yang efektif. Implementasi kebijakan dipahami melalui kerangka *Mazmanian & Sabatier*, *Collaborative Governance*, dan *Street-Level Bureaucracy* yang menyoroti

pentingnya koordinasi antar-aktor, kapasitas pelaksana, serta dukungan kelembagaan. Sementara itu, evaluasi kebijakan menegaskan perlunya mekanisme pengukuran hasil dan pembelajaran kebijakan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan strategi pengelolaan sampah sesuai dinamika sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, tiga bab ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan teknis, tetapi merupakan hasil dari proses kebijakan publik yang kompleks dan adaptif. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara aktor, regulasi, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus menekankan pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan berorientasi pada perubahan perilaku sosial serta ketahanan ekologi jangka panjang.

REFERENSI

- Artamevia, V.D., & Yuanjaya, P. (2024). Stakeholder Engagement dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Lokal: Pengalaman dari Desa Panggungharjo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(3), 12.
- Artha Heru; Candradewini, A. D. N. (2023). Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat : Collaborative Implementation of Nagari Waste Management Policy in West Pasaman Regency : *MATRA PEMBARUAN: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1), 25–36.
- Artiningsih, A., Worosuprojo, S., Rijanta, R., & Hardoyo, S. R. (2016). Enhancing Social-Ecological Resilience in Indonesia: A Case of North Pekalongan District, Central Java. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4(3), 187. <https://doi.org/10.14710/jwl.4.3.187-198>
- Azzahra, N., & Frinaldi, A. (2023). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No . 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang : Sistematis Literatur Review. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, 35–42.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/150%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/150/136>
- Bonti, B., Bakti, H., Utami, S. B., Setiawan, T., Pancasilawan, R., & Halim, H. A. (2024). Membangun Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 5(1), 19–34. <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i1.51344>
- Burhanuddin. (2024). Sinergi International Journal of Management and Business Sustainable Waste Management Practices in Indonesia. *Sinergi International Journal of Management and Business*, 2(1), 11–25.
- Febrian, S. (2025). Socio-Ecological Justice in Waste Governance: Community Resilience in Peri-Urban Piyungan, Yogyakarta. In *Journal of Society Bridge* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.78>
- Fernandes, G., Aguirre-Jaimes, A., Contreras-Varela, X., Cocolletzi, E., de Sousa, W. O., Araujo, L., Nunes, B., Angeles, G., Quesada, M., Briones, O., Ceccantini, G., Ornelas, J. F., Stokes, A., Angeles, G., Anthelme, F., Aranda-Delgado, E., Barois, I., Bounous, M., Cruz-Maldonado, N., ... Dipholis, I. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *New Phytologist*, 51(1), 2022. https://doi.org/10.20935/AL189%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttp
- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nanggolan, A. C., Putra, A. A. H., Kinanti, C. A., Darmawan, G. S., Pratama, R. A., & Rodja, Z. (2025). Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Proses Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Mekar Sari. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 280–289.
- Hulu, A. (2023). *Studi Inovasi Strategi Kebijakan Percepatan Pencapaian Swasembada Kedelai Indonesia Tahun Study of Policy Innovation Strategy to Accelerate*. 7, 13–23.

- Ismah, U. B. (2021). 1, 2, 1(4), 799–805.
- Larasati, A. F., & Santoso, E. B. (2023). Jaringan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Bentuk Transisi Ekonomi Sirkular di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 248–257. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.248-257>
- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Nur Syahida, H., & Sitorus, C. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12235–12247. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Maskun, M., Mohamad Khalid, R., Ratnawati, R., Mukhlis, M. M., Anggara, W., & Ramli, R. N. R. (2024). Strengthening Indonesia's Waste Management Laws: Compliance with Public Health and Marine Conservation Norms. *Substantive Justice International Journal of Law*, 7(2), 142–166. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i2.298>
- Nurkhamid, M. (2023). 3173-3186. 3, 3173–3186.
- Putri, F. Y. (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 315–329. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Qodriyatun, S., Santoso, R., Arini, N., Efendi, Poerwanti, P., Prasetiawan, T., Adhiem, M., & Hariyadi. (2023). *Pengelolaan Sampah: Kebijakan, Implementasi, dan Revisi Undang-Undang*.
- Raihana Zahra Aurellia. (2023). *Rasionalitas terbatas*. 332–343. https://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality
- Rama Nanda, Aldri Frinaldi, Rembrandt Rembrandt, & Dasman Lanin. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Air Dingin Berdasarkan Analisis SWOT dan Peraturan Lingkungan. *Jurnal Sains Dan Ilmu Terapan*, 7(2), 67–76. <https://doi.org/10.59061/jsit.v7i2.853>
- Salsabila, L., Ariany, R., & Koeswara, H. (2024). Fostering Community-Led Waste Management Through Dynamic Governance: A Case Study of Batam City. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 187–200. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.187-200>
- Sari, H. M., & Afrinaldi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 228–238. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.228-238>
- Sia Niha, S., Lopes Amaral, M. A., & Tisu, R. (2022). Factors Influencing Behavior to Reducing Household Food Waste in Indonesia. *Kinerja*, 26(1), 125–136. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v26i1.5493>
- Taufik. (2023). Advocacy Coalition Framework Dalam Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. *Jurnal Sanger : Social, Administration and Government Review*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.22373/sanger.v1i1.2955>
- Widyatama, B. (2018). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region. *Journal of Government and Civil Society*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.643>

- Wijaya, S. S. (2023). Editorial: A Reflective Take on The Government Decisions in Facing Global Uncertainty. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.20884/juss.v6i1.8526>
- Wikurendra, E. A., Csonka, A., Nagy, I., & Nurika, G. (2024). Urbanization and Benefit of Integration Circular Economy into Waste Management in Indonesia: A Review. *Circular Economy and Sustainability*, 4(2), 1219–1248. <https://doi.org/10.1007/s43615-024-00346-w>
- Wimmy, H. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19–30.
- Yuliatiningtyas, S. (2023). ‘*Re - thinking of Agenda Setting Theory* .’ 07(01), 25–44.